

Analisis Sentimen dan Persepsi Publik terhadap Pemotongan Anggaran Inpres 1/2025 di Media Sosial

Problem Statement

Instruksi presiden no 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja bulanan negara dan daerah menuai berbagai reaksi masyarakat Indonesia.

Sehingga analisis sentimen di media sosial yang merupakan wadah utama bagi masyarakat menyuarakan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk melihat respons masyarakat secara real-time dan memberikan gambaran terhadap penerimaan kebijakan di lapangan.

Rumusan Masalah

- Apa isu-isu utama terkait dengan Inpres 1/2025?
- Bagaimana sentimen publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran?
- Bagaimana respon publik terhadap berbagai isu efisiensi anggaran?
- Apa ekspektasi publik tekait kebijakan efisiensi anggaran?

PERIODE DATA

JANUARI - MARET 2025

SUMBER DATA

YOUTUBE

JUMLAH DATA

6157

KATA KUNCI

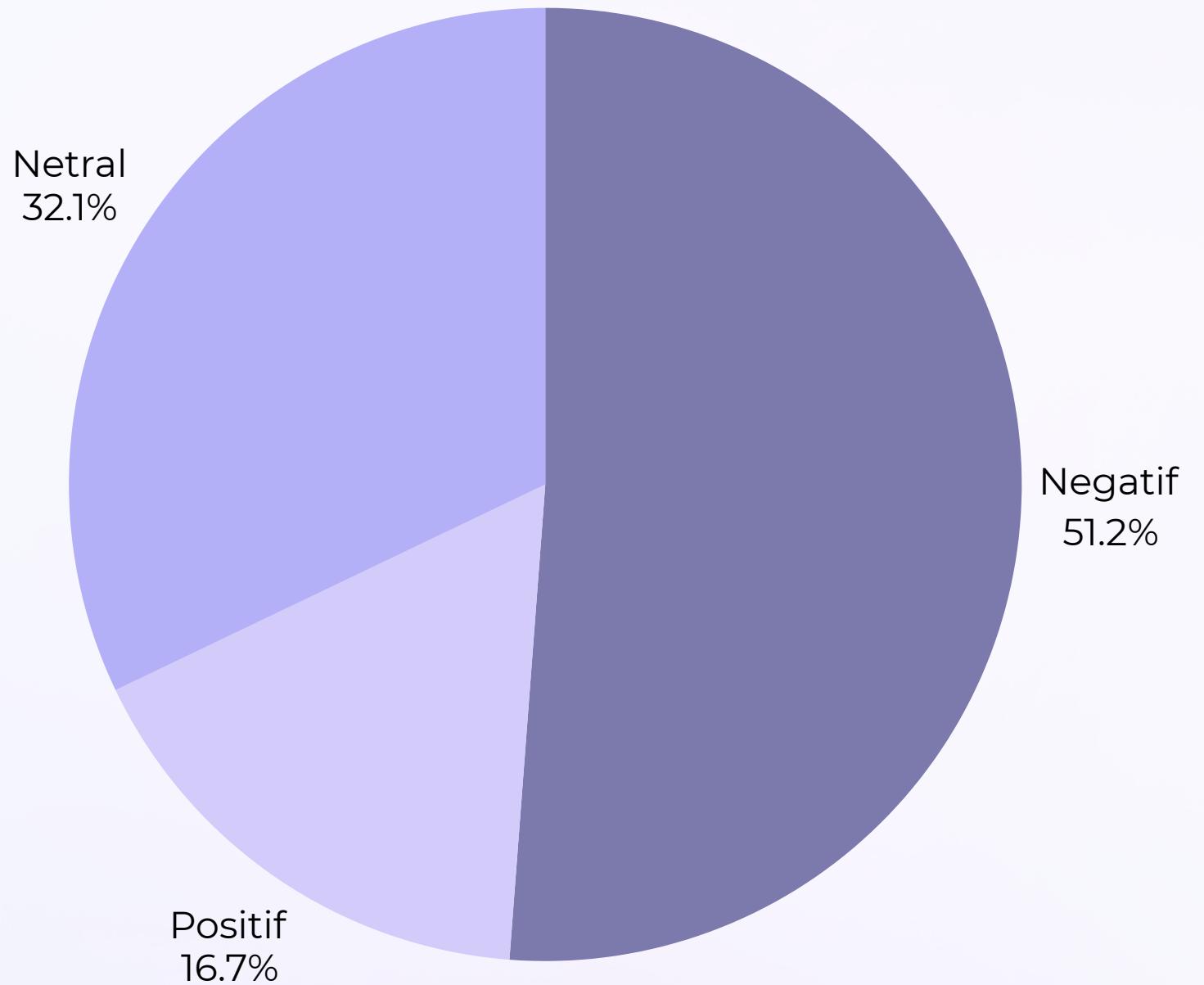
Efisiensi Anggaran
Pangkas Anggaran
Pemotongan Dana

tren topik

Tren Topik Efisiensi Anggaran



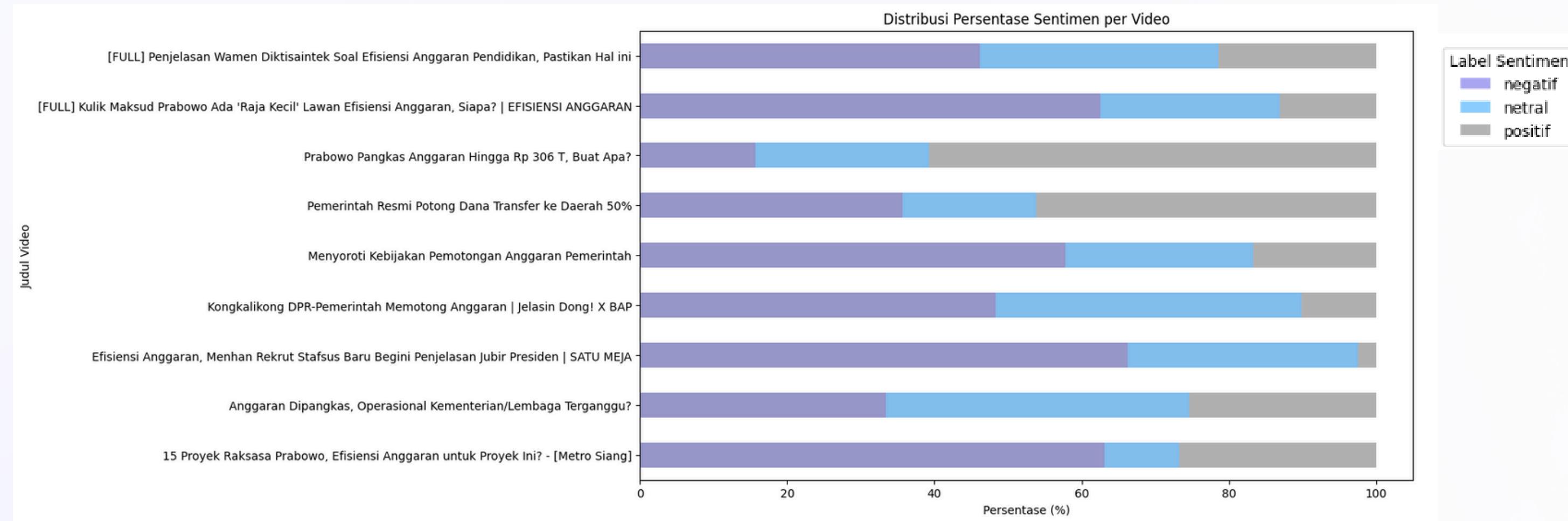
Puncak tren komentar terkait efisiensi anggaran terjadi di awal-pertengahan Februari 2025, seiring dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025..



Klasifikasi Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran

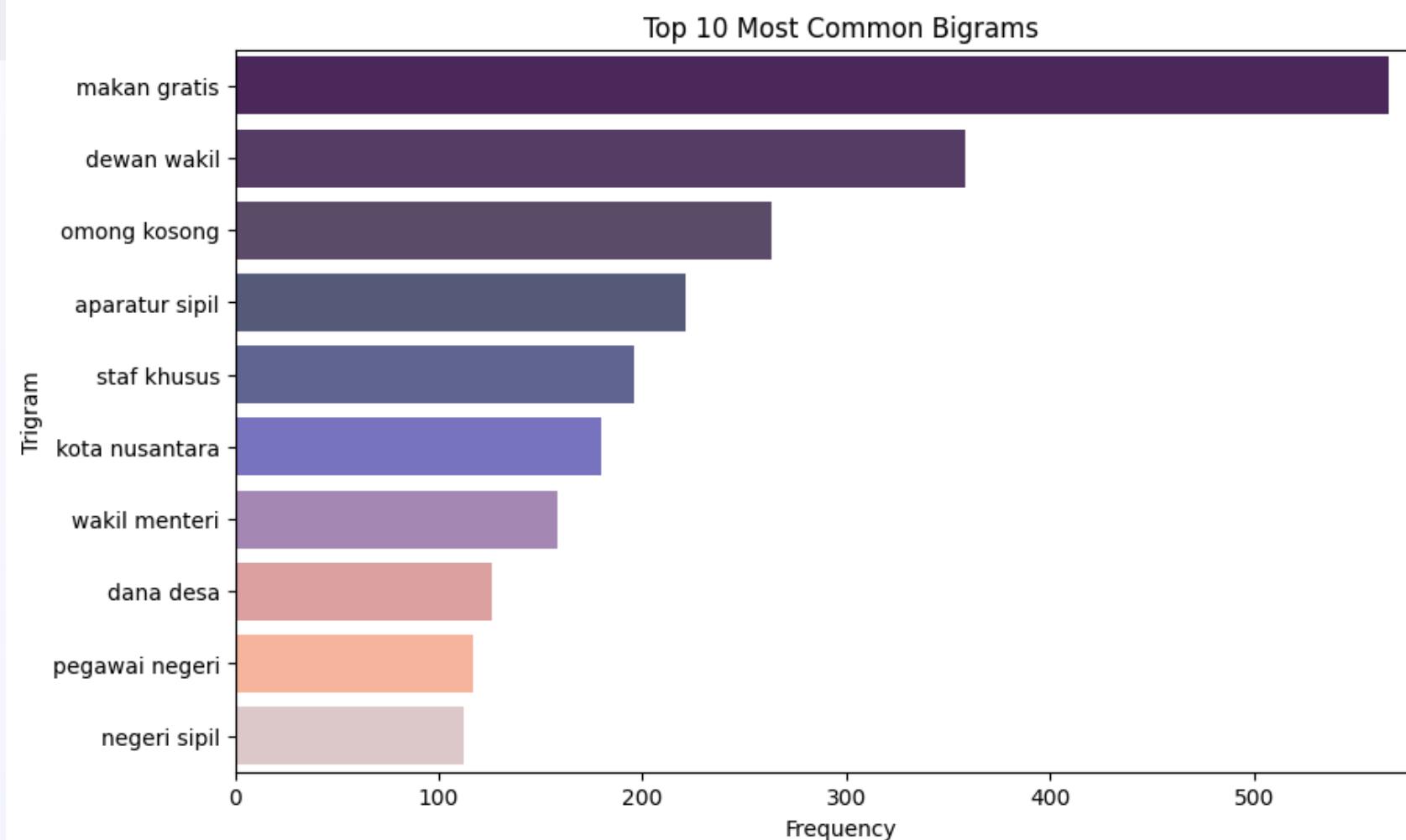
menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak setuju atau memiliki persepsi buruk terhadap kebijakan ini.

Distribusi Sentimen Per Video



Sentimen publik cenderung negatif, terutama pada video terkait perekrutan stafsus Menhan.

Top 10 Most Common Bigrams



- Makan gratis & kota nusantara → isu alih fungsi anggaran
- Wakil mentri & Staff khusus → pembahasan dan kritik penambahan pejabat
- aparatur sipil, pegawai negeri, negeri sipil → Dampak kebijakan terhadap kinerja
- dewan wakil & dana desa → Peran DPR/DPD & penggunaan dana desa
- Omong Kosong → Kritik publik

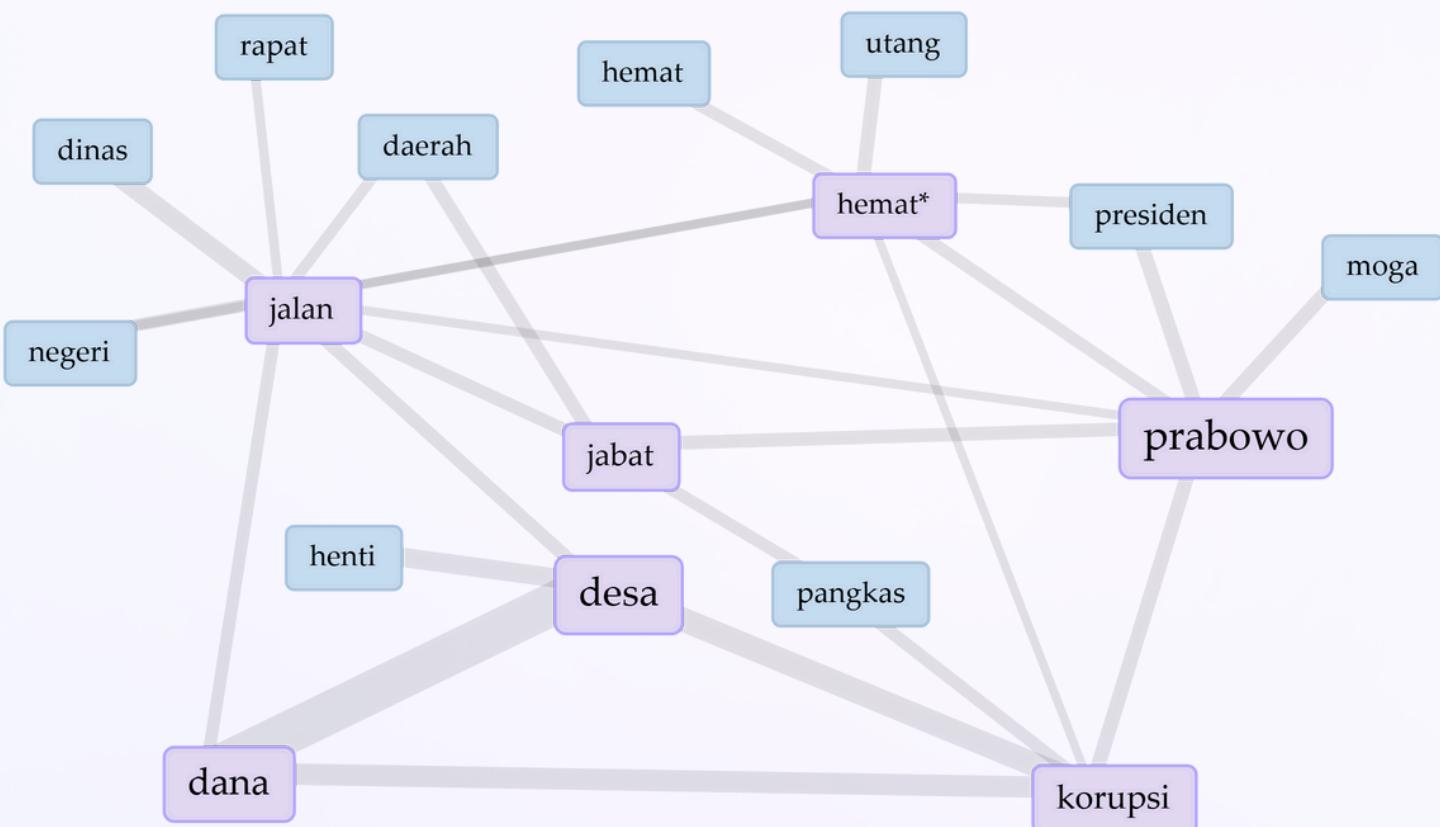


WordCloud Sentimen Positif

Adanya dukungan pada langkah prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditandai dengan munculnya kata ‘bagus’.



WordLink Sentimen Positif



- pemangkasan dana desa dinilai layak untuk mencegah korupsi di tingkat desa.
- Penghematan anggaran perjalanan dinas pejabat mendapat sambutan positif publik sebagai langkah bijak dalam penggunaan anggaran negara.



komentar

A

@aminrahayu1846 3 bulan yang lalu

Bagus ada penghematan anggaran utk pejabat, spy ikut merasakan kesulitan rakyat, tdk hidup bermewah2 dr pajak rakyat. Bravo tempo ❤

19



Balas

M



@MardianaShofia 3 bulan yang lalu

MAMPUSS MABTAP PAK PRABOWO PRESIDEN SEUMUR HIDUP.. DAERAH2 KORUPSINYA PARAH APALAGI DANA DESA CUMA BUAT BAGUN RUMAH LURAH + JALAN2 SEWA LC

1



Balas



@muntianianwar1235 3 bulan yang lalu

Alhamdulillah.. Penghematan, lebih baik dari pada hutang. Seperti jokowi membebani Negara dan bangsa, buat rakyat sengsara 😢

1



Balas

Komentar Positif



@tvadekaka7559 3 bulan yang lalu

Anggaran membludak klo hasil hutang mah berefek negatif dalam jangka panjang....lebih baik menghemat.... seperti juga klo mengatasi ekonomi rumah tangga klo menghambur hamburkan uang juga akan morat marit.....harus ngerem lah pemakaian uang negara..... pejabat pejabat saat ini saya rasa hidup sudah mewah ...
Baca selengkapnya

1



Balas



WordCloud Sentimen Negatif

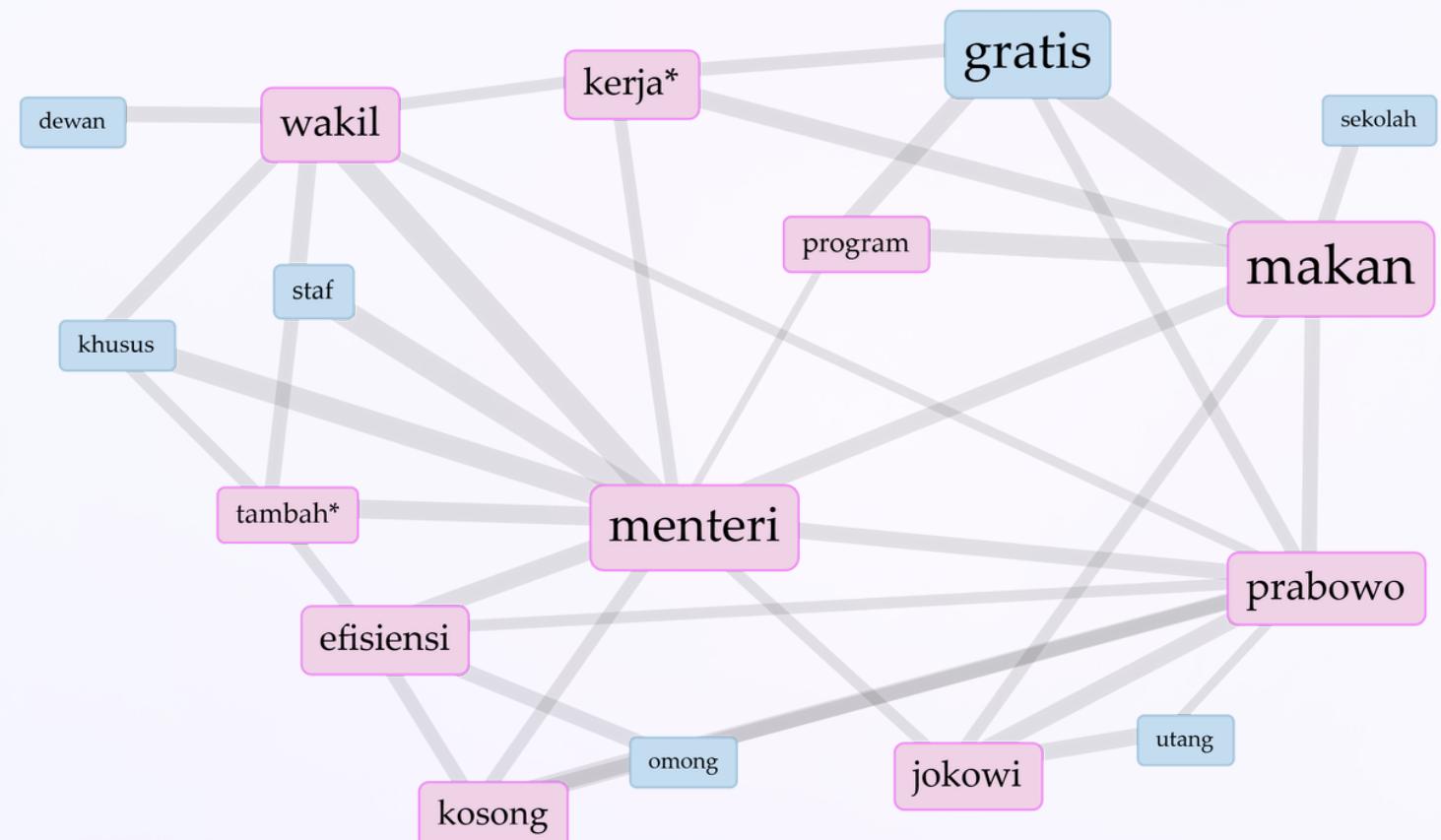
Adanya penolakan pada langkah Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditandai dengan banyaknya kata 'omong kosong' yang muncul.



WordLink Sentimen Negatif

kebijakan efisiensi anggaran dinilai:

- Bertolak belakang dengan penambahan kementerian & staf
- Dianggap sebagai alih fungsi untuk jalankan program yang tidak ada urgensinya (contoh: MBG)
- Berpotensi berdampak pada pemutusan hubungan kerja
- Dibuat untuk tutupi beban fiskal akibat proyek infrastruktur era sebelumnya



komentar



@sigemoyfit-club7266 3 bulan yang lalu

Potong dong tunjangan DPR, Menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi... Jangan cuman potong yg kecil kecilnya saja... Kasian mereka yg pelaksana di lapangan...



2



Balas



@ariefbudiman77 3 bulan yang lalu

Sektor jasa EO, perhotelan, pariwisata, pelatihan, atk, Mamin.. terpukul banget ini.. siap² aja PHK gede²an..

Lu jangan mikir ASN nya donk.. ASN digaji negara setiap bulan. Kalau sektor swasta siapa yg gaji???



1



Balas



@Zet-j4m 3 bulan yang lalu

anak2nya dapat makan gratis tp orang tuanya pada ilang kerjaan gara2 efisiensi



1



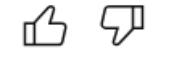
Balas

Komentar Negatif



@wahyuabdillah8100 3 bulan yang lalu

Lagian konteks efisiensi yang digaungkan ga singkron sama Kementerian/Lembaga yang makin Gemuk 😂😂 disitu aja ga masuk. Disamping itu si wowo ga bisa apa2 karena menanggung sisa utang era mulyono 😂😂 mamam tuh chaos2 yang ada indo. Akibat salah pilih presiden



1



Balas



@maztanto2080 ★ 3 bulan yang lalu (diedit)

Potong anggaran subsidi gas lpg ngakunya menertibkan harga itu kerja elit penguasa. Rakyat jadi korban. Program MBG yang gak berguna gak penting dipaksakan, sementara kasus stunting ibu hamil tidak diprioritas. BPJS dikalahkan anggaran belanja alutista. Kita ga butuh perang, ngga perlu beli senjata modern. Salah prioritas.

Presidennya suka jalan2 keluar negeri pakai pesawat khusus.

Lebih sedikit



1



Balas

KESIMPULAN

- Kebijakan efisiensi inpres 1/2025 menuai pro dan kontra
- Didukung karena dianggap dapat mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran
- Kritik muncul karena dinilai omong kosong belaka dan berdampak negatif pada masyarakat
- Program MBG, IKN, dan pengangkatan stafsus menjadi isu utama pada inpres 1/2025

S SARANN

- Pangkas anggaran yang tidak mendesak.
- Evaluasi berkala terhadap efektivitas program agar anggaran tepat sasaran.
- Hindari efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan.
- Transparansi penggunaan anggaran
- Libatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran

THANK YOU